

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG UPAH PEKERJA  
BANGUNAN PROGRAM BANTUAN STIMULAN  
PERUMAHAN SWADAYA**

(Studi di Desa Sabah Balau Kecamatan Tanjung Bintang  
Kabupaten Lampung Selatan)

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Melengkapi  
Syarat-syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana S1  
Dalam Ilmu Syari'ah

**Oleh :**

**Via Rizky Septiana  
NPM. 1721030451**

**Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)**



**FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
TAHUN 1442 H / 2021**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG UPAH PEKERJA  
BANGUNAN PROGRAM BANTUAN STIMULAN  
PERUMAHAN SWADAYA**

(Studi di Desa Sabah Balau Kecamatan Tanjung Bintang  
Kabupaten Lampung Selatan)

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Melengkapi  
Syarat-syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana S1  
Dalam Ilmu Syari'ah

Oleh :

**Via Rizky Septiana**  
**NPM. 1721030451**

**Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah)**

**Pembimbing I : Dr. H. A. Khumedi Ja'far, S.Ag. M.H.**

**Pembimbing II : Badruzzaman, S.Ag., M.H.I.**

**FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
TAHUN 1442 H / 2021 M**

## ABSTRAK

Berbagai kegiatan bermuamalah yang sering dilakukan oleh masyarakat Desa salah satunya adalah upah-mengupah (*ijarah*). Upah merupakan salah satu hal paling penting bagi para pekerja dalam suatu perusahaan. Tingkat upah hanya merupakan dorongan utama hingga pada tarif di mana upah itu belum mencukupi kebutuhan hidup para pekerja sepiutnya. Menentukan upah tidak boleh keluar dari aturan-aturan Islam, namun di Desa Sabah Balau pada program bantuan stimulan perumahan swadaya adanya upah tukang bangunan yang tidak sesuai dengan tarif normal dan pemberi upah menjanjikan akan ada penambahan upah tetapi sampai dengan bangunan rumah selesai upah tersebut tidak diberikan.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimana praktik pembayaran upah pekerja bangunan dalam program bantuan stimulan perumahan swadaya Di Desa Sabah Balau Kecamatan Tanjung Bintang? Bagaimana tinjauan hukum Islam Tentang pembayaran upah pekerja bangunan dalam program bantuan stimulan perumahan swadaya di Desa Sabah Balau Kecamatan Tanjung Bintang? Adapun Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Untuk mengetahui Praktik Pembayaran Upah Pekerja Bangunan Dalam Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Di Desa Sabah Balau Kecamatan Tanjung Bintang dan untuk mengetahui tinjauan hukum Islam tentang pembayaran upah pekerja bangunan dalam program bantuan stimulan perumahan swadaya

Dalam penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*) dengan penelitian yang bersifat deskriptif analisis dengan menggunakan sumber data primer dan skunder. Data primer diperoleh dari keterangan langsung dari pihak yang bersangkutan yaitu pekerja bangunan dan pemberi upah pada program bantuan stimulan perumahan swadaya dalam bentuk pengamatan, wawancara, dan dokumentasi sedangkan data skunder diperoleh dari sumber kepustakaan berupa buku-buku sebagai literatur penunjang penelitian ini. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, dokumentasi, pengolahan data melalui tahap editing dan sistematizing, analisis data secara kualitatif dengan pendekatan berpikir menggunakan metode induktif.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa praktik pembayaran upah pada program bantuan stimulan perumahan swadaya menjadi pertentangan dengan hukum syara' karena upah pekerja tidak sesuai dengan tarif normal dan upah pekerja tidak dibayarkan dengan apa yang telah dijanjikan. Kemudian Tinjauan hukum Islam terhadap pembayaran upah pekerja pada program bantuan stimulan perumahan swadaya tidaklah sah menurut syariat Islam karena dalam akadnya terjadi kecacatan yaitu tidak sesuai dengan rukun dan syarat sahnya akad ijarah adapun mengenai upah sangat dibenarkan oleh Islam selama rukun dan syarat sesuai. Tetapi hal ini Sehingga menimbulkan ketidakridhaan pada salah satu pihak dan menimbulkan kerugian pada tukang bangunan.

## PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Via Rizky Septiana

NPM : 1721030450

Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah (Mu'amalah)

Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “ Tinjauan Hukum Islam Tentang Upah Pekerja Bangunan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (Studi di Desa Sabah Balau Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan)” merupakan hasil karya ilmiah orisinil penulis, tidak mengandung materi yang telah dipublikasikan oleh orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut footnote atau daftar ujukan. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ilmiah ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penulis.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 30 Maret 2021

Via Rizky Septiana  
NPM. 1721030450





**KEMENTERIAN AGAMA  
UIN RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Alamat: Jl. Let. Kol. H. Suratmin Sukarame 1 Bandar Lampung Telp. (0721) 703260

**PERSETUJUAN**

Tim pembimbing setelah mengoreksi dan memberikan masukan serta arahan secukupnya, maka skripsi saudara:

Nama : **Via Rizky**  
NPM : **1721030450**  
Program Studi: **Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)**  
Fakultas : **Syari'ah**  
Judul Skripsi : **Tinjauan Hukum Islam Tentang Upah Pekerja Bangunan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (Studi di Desa Sabah Balau Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan)**


**MENYETUJUI**

Untuk dimunaqosahkan dan dipertahankan dalam sidang munaqosah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung

**Pembimbing I**

  
**Dr. H. A. Khumedi Ja'far, S.Ag. M. H.**  
NIP.197208262003121002

**Pembimbing II**

  
**Badruzzaman, S. Ag., M. H.I.**  
NIP.196806241997031003

Mengetahui,

Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah

  
**Khoiruddin, M.S.I.**

NIP.197807252009121002





**KEMENTERIAN AGAMA  
UIN RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Alamat: Jl. Let. Kol. H. Suratmin Sukarame 1 Bandar Lampung Telp (0721)703260

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul **Tinjauan Hukum Islam Tentang Upah Pekerja Bangunan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (Studi di Desa Sabah Balau Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan)**. Disusun oleh **Via Rizky Septiana**, NPM: 1721030450, Program Studi: Hukum Ekonomi Syariah, telah diujikan dalam sidang munaqasyah di Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung Pada Hari/Tanggal: Rabu / 22 September 2021.

**TIM MUNAQASYAH**

**Ketua : Khoiruddin, M. S. I.**

**Sekretaris : Muslim, S. H. I., M. H. I.**

**Penguji I : Drs. Henry Iwansyah, M. A.**

**Penguji II : Dr. H. A. Khumedi Ja'far, S.Ag. M. H.**

**Penguji III : Badruzzaman, S. Ag., M. H. I.**

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syariah

**Dr. H. Khoiruddin, M.H.**  
NIP. 19621022199303100





## MOTTO

وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْجُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَنْ  
اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَلْيُسِّمْ لَهُ أَجْرَ تَهْ (رَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ)

Dari Abu Sa'id Al Khudri ra. Bahwasannya Nabi Saw. Bersabda,  
*“Barang siapa mempekerjakan para pekerja, maka tentukanlah upahnya.”*

(HR. Abdurrazzaq)



## PERSEMBAHAN

*Assalamualaikum Wr. Wb*

Puji syukur kehadiran Allah SWT, penggenggam diri dan seluruh ciptaan-Nya yang telah memberikan hidayah, taufik dan Rahmat-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Sebagai tanda bakti, hormat, dan rasa terimakasih, saya persembahkan skripsi ini kepada orang-orang yang sangat saya cintai.

1. Kedua orang tua saya yaitu Bapak Hilal Hafiz dan Ibu Nurhasanah yang telah membesarkan, merawat, mendidik, mendoakan serta memberikan semangat dan dukungan yang tak terhingga untuk saya. Semoga Bapak dan Ibu Senantiasa diberikan kesehatan dan kebahagiaan dunia dan akhirat oleh Allah SWT.
2. Kakak saya Yoan Febrina yang selalu memberikan dukungan dan perhatiannya kepada saya. Semoga kita dapat selalu rukun dan selalu membahagiakan Bapak dan Ibu.
3. Almamater Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung

*Wassalamualaikum Wr. Wb.*



## RIWAYAT HIDUP

Penulis mempunyai nama lengkap Via Rizky Septiana. Dilahirkan pada tanggal 01 September 1999 di Bandar Lampung. Merupakan anak tunggal dari buah perkawinan pasangan Bapak Hilal Hafiz dan Ibu Nurhasanah dengan riwayat pendidikan sebagai berikut:

1. Taman Kanak-kanak (TK) di TK Al-Azhar 2 Perumnas Wayhalim Kota Bandar Lampung, lulus pada tahun 2005.
2. Tingkat Pendidikan Dasar di SD Negeri 1 Sukarame Kota Bandar Lampung, lulus pada tahun 2011.
3. Tingkat Pendidikan Menengah Pertama di SMP Negeri 29 Kota Bandar Lampung, lulus pada tahun 2014.
4. Tingkat Pendidikan Menengah Atas di SMA Negeri 12 Kota Bandar Lampung, lulus pada tahun 2017.
5. Pada tahun 2017 melanjutkan pendidikan ke tingkat pendidikan tinggi Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung Fakultas Syari'ah Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Wr.Wb*

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “ Tinjauan Hukum Islam Tentang Upah Pekerja Bangunan Pada Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (Studi di Desa Sabah Balau Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan)”. Shalawat serta salam tak lupa pula disanjung agungkan kepada Nabi Muhammad SAW, semoga kelak kita senantiasa mendapatkan syafa'atnya di hari akhir.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak dalam proses penyelesaian skripsi. Oleh karenanya pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Khairuddin, M.H. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.
2. Bapak Khoiruddin, M.S.I selaku ketua Jurusan/Prodi Hukum Ekonomi Syariah.
3. Bapak Dr. H. A. Khumaidi Ja'far, S.Ag.M.H dan Bapak Badruzzaman, S.Ag., M.H.I. selaku pembimbing I dan pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, arahan dan motivasi hingga skripsi ini selesai.
4. Seluruh dosen, pegawai dan staf karyawan di lingkungan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.



5. Segenap staf perpustakaan Syariah maupun perpustakaan pusat UIN Raden Intan Lampung yang telah memfasilitasi untuk melengkapi referensi dalam penulisan skripsi ini.
6. Staf Desa serta pekerja bangunan yang telah membantu dan memberikan izin serta bantuan selama dilakukannya penelitian.
7. Teman seperjuanganku dari awal kuliah hingga sekarang Rustom Nawawi yang telah memberikan motivasi, semangat serta nasehat untuk melakukan yang terbaik sampai dengan sekarang.
8. serta teman Muamalah I angkatan 2017 memberikan pengalaman dan cerita selama masa kuliah, semoga apapun niat baik kita dilancarkan oleh Allah SWT.
9. Almamater tercinta UIN Raden Intan Lampung.

Penulis menyadari skripsi ini masih banyak kekurangan, hal ini dikarenakan masih terbatasnya ilmu dan teori penelitian yang penulis kuasai. Oleh sebab itu penulis akan sangat menerima masukan dan kritik yang bersifat membangun untuk skripsi ini. Semoga jerih payah dan amal baik bapak, ibu serta teman-teman semua mendapat balasan dari Allah SWT

Bandar Lampung, 16 Maret 2021

Penulis

Via Rizky Septiana  
NPM. 1721030450

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
ABSTRAK .....	ii
PERNYATAAN ORISINALITAS.....	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	iv
PENGESAHAN .....	v
MOTTO .....	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
RIWAYAT HIDUP .....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL .....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN .....	xiv

### BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul .....	1
B. Latar Belakang Masalah .....	3
C. Fokus dan Sub-Fokus Penelitian.....	7
D. Rumusan Masalah .....	8
E. Tujuan Penelitian .....	8
F. Manfaat Penelitian .....	8
G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan.....	9
H. Metode Penelitian.....	11
I. Sistematika Pembahasan .....	16

### BAB II LANDASAN TEORI

A. Pengertian Upah .....	18
B. Dasar Hukum Upah .....	21
C. Rukun dan Syarat Upah .....	28
D. Macam-macam Upah .....	37
E. Hak menerima Upah .....	39
F. Sistem Pengupahan Dalam Islam.....	40
G. Berakhirnya Akad Upah.....	49
H. Prinsip-Prinsip Perjanjian .....	51

### BAB III DESKRIPTIF OBJEK PENELITIAN

A. Gambaran Umum Desa Sabah Balau Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan.....	55
1. Sejarah Desa Sabah Balau.....	55
2. Kondisi Geografis Desa Sabah Balau .....	58
3. Data Penduduk Desa Sabah Balau .....	59
4. Struktur Organisasi Desa Sabah Balau .....	64
B. Sistem Penetapan Upah Pekerja Bangunan dalam Pogram Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya di Desa Sabah Balau Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan .....	65



#### **BAB IV ANALISIS PENELITIAN**

- A. Sistem Penetapan Upah Pekerja Bangunan dalam Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya di Desa Sabah Balau Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan .....72
- B. Tinjauan Hukum Islam Tentang Pembayaran Upah Pekerja Bangunan dalam Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya.74

#### **BAB V PENUTUP**

- A. Kesimpulan .....78
- B. Rekomendasi .....79

#### **DAFTAR RUJUKAN**

#### **LAMPIRAN**



## DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Daftar Tabel Kepala Desa Sabah Balau. ....	57
Tabel 3.2 Jumlah Penduduk Menurut Kepala Keluarga. ....	59
Tabel 3.3 Jumlah Penduduk Berdasarkan Umur. ....	59
Tabel 3.4 Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan. ....	60
Tabel 3.5 Jumlah Sekolah Yang Ada Di Desa Sabah Balau. ....	60
Tabel 3.6 Jumlah Umat Beragama Desa Sabah Balau. ....	62
Tabel 3.7 Data Tempat Ibadah. ....	63
Tabel 3.8 Mata Pencarian Penduduk Desa Sabah Balau. ....	63
Tabel 3.9 Struktur Organisasi Pemerintahan. ....	64





## **DAFTAR LAMPIRAN**

- Lampiran 1 Dokumentasi
- Lampiran 2 Pedoman Wawancara
- Lampiran 3 Surat Keterangan Wawancara
- Lampiran 4 Rekomendasi Penelitian Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
- Lampiran 5 Surat Keterangan Izin Riset
- Lampiran 6 Berita Acara Seminar Proposal
- Lampiran 7 Blanko Konsultasi Skripsi
- Lampiran 8 Surat Keterangan Hasil Cek Turnitin



## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Penegasan Judul**

Sebelum menjelaskan keseluruhan materi skripsi ini terlebih dahulu akan diberikan penegasan dan pengertian yang terkandung di dalamnya untuk menghindari kekeliruan interpretasi maupun pemahaman makna yang terkandung di dalam judul skripsi ini adalah : **Tinjauan Hukum Islam Tentang Upah Pekerja Bangunan Program Bantuan Stimulan perumahan Swadaya (Studi Di Desa Sabah Balau Kecamatan Tanjung Bintang Kecamatan Tanjung Bintang).**

1. Tinjauan menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah hasil meninjau, pandangan, pendapat ( sesudah menyelidiki, mempelajari dan sebagainya). Sedangkan kata tinjauan menurut bahasa berasal dari kata “tinjau” yang berarti pandangan atau pendapat sesudah mempelajari atau menyelidiki suatu masalah.<sup>1</sup>
2. Hukum Islam adalah hukum hukum Allah SWT. Yang kewajibannya telah diatur secara tegas dan jelas di dalam Al-Qur'an atau hukum-hukum yang ditetapkan oleh wahyu. Sedangkan permasalahan yang belum jelas di dalam al-Qur'an perlu penafsiran untuk menentukan<sup>2</sup> hukum baru dari permasalahan tersebut yang dinamakan dengan istilah fiqh.

---

<sup>1</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 190) h.951

<sup>2</sup> Siti Mahmudah, *Historisitas Syari'ah* ( Kritik Relasi-Kuasa Khalil ‘ Abd al-Karim) (Yogyakarta: LkiS Pelangi Aksara, 2016,h.197.

3. Upah adalah imbalan yang diberikan kepada tenaga kerja yang telah diperintahkan untuk mengerjakan suatu pekerjaan dan pembayaran upah diberikan menurut perjanjian yang telah disepakati.<sup>3</sup>
4. Pekerja adalah seseorang yang bekerja dan menerima hasil upah dari pekerjaannya.<sup>4</sup>
5. Bangunan sesuatu yang didirikan atau dibangun ( seperti rumah, gedung, dan menara).<sup>5</sup>
6. Bantuan Stimulan adalah fasilitasi pemerintah berupa sejumlah dana yang berupa material yang diberikan kepada MBR penerima manfaat bantuan stimulan untuk membantu pelaksanaan pembangunan perumahan swadaya.<sup>6</sup>
7. Perumahan Swadaya adalah rumah atau perumahan yang dibangun atas prakarsa dan upaya masyarakat, baik secara sendiri atau berkelompok, yang meliputi perbaikan, pemugaran/ perluasan atau pembangunan rumah baru beserta lingkungan.<sup>7</sup>

Berdasarkan penegasan judul di atas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud judul skripsi ini adalah satu kajian tentang Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Pekerja Bangunan Program Bantuan Stimulan

---

<sup>3</sup> Kumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam*, (Bandar Lampung: Permatanet Publishing, 2016), h. 141.

<sup>4</sup> Imam Soepomo, *Pengantar Hukum Islam* (Jakarta: Djambatan, 1994), h. 54.

<sup>5</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Indonesia Pusat Bahasa*, h. 227

<sup>6</sup> Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat RI Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah Pasal 1

<sup>7</sup> *Ibid*

perumahan Swadaya yang terjadi di Desa Sabah Balau Kecamatan Tanjung Bintang Kecamatan Tanjung Bintang.

## **B. Latar Belakang Masalah**

Sebagai makhluk sosial kehidupan bersama itu melahirkan berbagai pengalaman berhubungan dengan orang lain. Islam adalah suatu sistem hidup yang praktis, mengajarkan segala yang baik dan bermanfaat bagi manusia, kapan dan di mana pun tahap-tahap perkembangannya.<sup>8</sup>

Manusia tidak terlepas dari suatu hubungan , baik itu dengan hubungan dengan Allah SWT maupun hubungan kepada manusia. Hubungan manusia sesama manusia biasa disebut dengan Muamalah. Muamalah merupakan bagian dari hukum Islam yang mengatur Hubungan antara seseorang dengan orang lain. Contohnya, Hukum Islam yang termasuk upah mengupah salah satu bentuk pengembangan kualitas kerja adalah upah.<sup>9</sup>

Manusia memiliki kebutuhan primer yang tidak bisa dinomor dua kan, kebutuhan primer tersebut tak lain adalah sandang (pakaian), pangan (makanan) dan papan (rumah). Dalam pembangunan suatu rumah jelas membutuhkan pekerja atau buruh, begitu pula para pekerja atau buruh mempunyai tujuan untuk mendapatkan upah dari hasil mereka bekerja membangun rumah orang lain.

<sup>8</sup> Lukman Hakim, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*, (Jakarta: Erlangga, 2012), h.104.

<sup>9</sup> Masfuk Zuhdi, *Studi Islam Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Graindo Persada, 2019), h.2.



Manusia melakukan kegiatan, ada yang bisa dilakukan sendiri, ada juga yang harus dilakukan melalui kegiatan orang lain. Berkaitan dengan kegiatan melalui orang lain inilah yang harus diberi imbalan dalam bentuk upah dengan imbalan bentuk lain. Dalam Praktik pemberian upah, mengikuti sistem pengupahan pasar, sistem upah progresif, sistem pengupahan melalui skala dan struktur upah. Hal tersebut tergantung bagaimana jenis pekerjaan, beban kerja, waktu dan lainnya.

Pembayaran upah tergantung pada perjanjian yang telah disepakati bersama. Dalam hal pembayaran upah boleh dibayar terlebih dahulu sebelum pekerjaan itu selesai dikerjakan. Namun sebaiknya upah dibayarkan setelah pekerjaan itu selesai dikerjakan.<sup>10</sup>

Hadis menjelaskan bahwa seseorang harus membayar pekerja secepat mungkin tanpa ditunda dengan berbagai alasan apapun, sistem penyegeraan pembayaran upah adalah termasuk dalam pengupahan yang layak dilihat dari cara pemberiannya, tentu dengan catatan pekerjaan yang telah diamanatkan juga segera ditunaikan dan diselesaikan.<sup>11</sup>

Muamalah merupakan sistem kehidupan yang memberi warna pada setiap dimensi hubungan manusia, tak terkecuali pada dunia ekonomi, bisnis, dan sosial yang Allah SWT ciptakan, termasuk perbuatan muamalah adalah sistem kerja sama pengupahan.<sup>12</sup> Hal ini dimaksudkan

---

<sup>10</sup> Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer*, h.191

<sup>11</sup> Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Bandar Lampung: Permatanet Publishing, 2016), h.143

<sup>12</sup> Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah* ..... h. 10.

usaha kerja sama saling menguntungkan kedua belah pihak untuk meningkatkan taraf hidup.

Bentuk muamalah yang terjadi adalah kerjasama antara manusia di satu pihak sebagai penyedia jasa manfaat atau tenaga yang disebut sebagai pekerja, di pihak lain yang menyediakan pekerjaan disebut penyedia lahan pekerjaan atau dapat disebut dengan majikan. Kerja sama ini dengan literatur fiqh muamalah yang disebut dengan akad ijarah al- A'mal, yaitu sewa-menyewa jasa manusia.<sup>13</sup> Upah merupakan hak bagi setiap orang yang bekerja dalam kebutuhan ekonomi yang tidak boleh diabaikan dan kewajiban majikan untuk memenuhinya.

Tujuan pemerintah mengatur upah dan pengupahan pekerja/buruh adalah untuk melindungi pekerja dari kesewenang-wenangan pengusaha dalam pemberian upah. Setiap pekerja/buruh berhak mendapatkan penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi manusia berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003.<sup>14</sup>

Upah diberikan harus adil agar tidak merugikan salah satu pihak dan upah harus sesuai dengan kemampuan masing-masing. Sebagaimana dijelaskan pada Surat Al- Nahl ayat 90 sebagai berikut :

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَائِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ  
وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ٩٠

Artinya:”Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang

<sup>13</sup> Rahmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h.215

<sup>14</sup> Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenaga Kerja.

*dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu mengambil pelajaran”.*

Dalam hal ini adil adalah menggambarkan keseimbangan dan keharmonisan. Nilai keadilan menuntut antara lain sesuatu yang menjadi haknya. Oleh karena itu prinsip keadilan tidak terlepas dari keseimbangan antara hak dan kewajiban.

Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya adalah upaya pemerintah untuk membantu Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dalam membangun rumah layak huni untuk mensejahterakan masyarakat. Dalam hal proses membangun rumah memakai sistem tenaga tukang (tenaga ahli renovasi rumah) atau bisa dibantu oleh sistem gotong royong.

Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 33 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Berbasis Komunitas (BSPS-BK) di Kabupaten Lampung Selatan menetapkan pembangunan rumah baru atau peningkatan kualitas rumah diberikan waktu selama 120 hari, apabila penerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya tidak dapat menyelesaikan dalam kurun waktu yang sudah ditetapkan akan dikenakan sanksi. Pemerintah menetapkan upah tukang (tenaga ahli) diberikan dana sebesar Rp. 2.500.000., dan tukang bangunan tersebut bekerja selama 120 hari. Di dalam tarif normal biasanya upah tukang perhari sebesar Rp. 100.000, tetapi dalam prakteknya upah tukang bangunan pada program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya tidak sesuai dengan tarif normal. Oleh karena itu penerima bantuan menjanjikan

adanya upah tambahan akan tetapi pada prakteknya upah tersebut tidak diberikan sampai pembangunan itu selesai.<sup>15</sup>

Hal inilah yang melatar belakangi timbulnya kerugian dikarenakan upah tukang yang tidak sesuai dengan tarif normal dan tidak adanya penambahan upah yang sesuai. Berangkat dari permasalahan inilah penulis tertarik untuk mengkaji secara lebih dalam bagaimana “ Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Pekerja Bangunan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (Studi di Desa Sabah Balau Kecamatan Tanjung Bintang)”.

### **C. Fokus dan Sub-Fokus Penelitian**

Dari penjelasan latar belakang masalah di atas, maka penelitian ini lebih fokus pada persoalan tinjauan hukum Islam yang terkait dengan penetapan upah dalam pembangunan rumah program bantuan stimulan perumahan swadaya. Untuk meneliti permasalahan tersebut menggunakan metode kualitatif, pendekatan yang sistematis dan subjektif yang digunakan untuk menggambarkan pengalaman hidup dan memberikan sebuah makna.

---

<sup>15</sup> Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 33 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Berbasis Komunitas (BSPS-BK)



#### **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana Praktik Pembayaran Upah Pekerja Bangunan Dalam Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Di Desa Sabah Balau Kecamatan Tanjung Bintang ?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembayaran Upah Pekerja Bangunan Dalam Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Di Desa Sabah Balau Kecamatan Tanjung Bintang ?

#### **E. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui Praktik Pembayaran Upah Pekerja Bangunan Dalam Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Di Desa Sabah Balau Kecamatan Tanjung Bintang
2. Untuk mengetahui Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembayaran Upah Pekerja Bangunan Dalam Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Di Desa Sabah Balau Kecamatan Tanjung Bintang

#### **F. Manfaat Penelitian**

1. Secara teoritis berguna sebagai upaya menambah wawasan ilmu pengetahuan bagi penulis, serta dapat dijadikan rujukan bagi penulis berikutnya, guna memperoleh keilmuwan dalam bidang hukum Islam.
2. Penelitian ini dimaksudkan sebagai suatu syarat untuk memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar S.H. pada Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.

## G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang penulis jadikan refrensi dalam penelitian ini, di antaranya :

Pertama, Penelitian yang dilakukan oleh Lia Dwi Dana tahun 2019 mahasiswi UIN Raden Intan Lampung, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Upah Sebagai Pekerja Pramusaji Bar”. Penelitian ini membahas bagaimana hukum islam mengenai tentang upah sebagai pekerja pramusaji Bar. Melihat dari produk-produk bar tersebut terdapat menu minum-minuman yang memabukkan. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah upah yang diterima oleh pramusaji bar dapat dihukumi haram dikarenakan dalam konteks ini, upah pramusaji dapat dihukumkan haram dan dilarang dalam agama karena aktivitas di MSB lebih dominan menjurus kepada hal-hal yang dimurkai Allah SWT.<sup>16</sup>

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Binti Masitoh tahun 2019 mahasiswi UIN Raden Intan Lampung, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah yang berjudul “ Tinjauan Hukum Islam Tentang Upah Bagi Tokoh Agama”. Penelitian ini membahas bagaimana hukum Islam mengenai tokoh agama yang bertugas untuk mengurus jenazah dan mengimami setiap acara yasinan , dan setiap kepala keluarga memberikan upah berupa beras sebesar 2kg dan waktu pembayarannya setahun sekali setelah panen. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah penelitian ini tidak

---

<sup>16</sup> Lia Dwi Dana, “*Tinjauan Hukum Islam Tentang Upah Sebagai Pekerja Pramusaji Bar*” (Skripsi UIN Raden Intan Lampung, Lampung, 2019)

dapat disebut upah dikarenakan tidak memenuhi unsur upah (jenis pekerjaan tidak terukur). Oleh karenanya lebih tepat disebut imbalan/ucapan terima kasih masyarakat. Menurut hukum Islam imbalan/ucapan terima kasih diberikan masyarakat terhadap tokoh agama sifatnya mubah (boleh).<sup>17</sup>

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Indah Tri Oktavia tahun 2018 mahasiswi IAIN Metro, Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang berjudul “ Sistem Perhitungan Upah Pada Pembuatan Sulam Usus Perspektif Etika Bisnis Islam”. Penelitian ini membahas bagaimana permasalahan upah buruh yang tidak adil dimana seluruh pekerjaannya memperoleh upah yang sangat minim dan setiap pekerja upahnya tidak dibedakan. Padahal mengingat semua pekerjaan dari setiap pekerjaannya berbeda-beda, yaitu antara penyulam kebaya dengan penjahit kebaya. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah pandangan etika bisnis islam terhadap praktek sistem perhitungan upah pada pembuatan sulam usus di Elfira Collection jika dipandang dari etika bisnis islam makan prinsip tauhid, kebebasan, dan pertanggung jawaban sudah sesuai, tetapi jika dikaitkan dengan prinsip keadilan bersifat tidak adil.<sup>18</sup>

Hal ini banyak persamaan dan perbedaan dalam penelitian yang dilakukan mengenai teori upah. Persamaan dalam kajian penelitian terdahulu membahas teori upah, tetapi perbedaan dalam kajian penelitian ter-

---

<sup>17</sup> Binti Masitoh, “ *Tinjauan Hukum Islam Tentang Upah Bagi Tokoh Agama*” (Skripsi UIN Raden Intan Lampung, Lampung, 2019)

<sup>18</sup> Indah Tri Oktavia, “ *Sistem Perhitungan Upah Pada Pembuatan Sulam Usus Perspektif Etika Bisnis Islam*” (Skripsi IAIN Metro, 2018)

dahulu adanya perbedaan Tempat, Fokus Penelitian, dan Subjek yang berbeda. Namun dalam perkembangannya belum ada penelitian yang membahas tentang upah pekerja bangunan dalam program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya, dikarenakan tidak sesuai dengan pembayaran upah yang seharusnya. Maka penelitian ini bermaksud untuk menambah wawasan keilmuan dibidang teori upah.

## H. Metode Penelitian

Metode yang digunakan penelitian ini merupakan metode kualitatif. Dikarenakan penelitian kualitatif adalah penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis, serta proses dan makna lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif.

### 1. Jenis dan Sifat Penelitian

#### a. Jenis penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*), penelitian ini menghasilkan data deskriptif berupa kata tertulis atau lisan dari orang dan perilaku yang dapat diamati.<sup>19</sup> Adapun untuk melakukan sebuah penelitian lapangan peneliti harus memperoleh data secara langsung dengan mendatangi subjek yang bersangkutan dengan permasalahan penelitian tersebut.

#### b. Sifat penelitian.

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif yaitu suatu penelitian yang dilakukan dalam kehidupan yang sebenarnya.

<sup>19</sup> Lexi J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 1995), h.3.



Penelitian deskriptif yaitu sebuah uraian sistematis teori dan hasil penelitian yang relevan dengan variabel yang diteliti.

Penelitian ini menggambarkan secara tepat mengenai sifat suatu individu, keadaan, gejala, atau kelompok tertentu dalam proses penyederhanaan data penelitian yang amat besar jumlahnya menjadi informasi yang lebih sederhana agar mudah dipahami apa yang terjadi di lapangan.

## 2. Sumber Data Penelitian

### a. Data Primer

Data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data yang dilakukan dengan metode lapangan, yakni penelitian dilakukan langsung dari hasil wawancara, pengamatan dokumen yang diterima dari responden atau objek yang diteliti.<sup>20</sup> Data primer didapat dari observasi dan wawancara kepada Buruh Bangunan pada Pembangunan Rumah Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya.

### b. Data sekunder.

Data sekunder merupakan data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data sekunder yang diperoleh peneliti dari buku-buku yang membicarakan topik yang berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan judul dan pokok bahasan kajian ini akan tetapi mempunyai relevansi dengan

---

<sup>20</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2009), h.225.

permasalahan yang akan dikaji.<sup>21</sup> Sumber data sekunder yang dipakai oleh penulis adalah beberapa sumber yang relevan dengan penelitian yang penulis lakukan, antara lain: Al-Qur'an, hadits, buku, kitab-kitab fikih, skripsi dan literatur lainnya.

### 3. Populasi dan Sampel

#### a. Populasi

Populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek dan subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan. Populasi dari penelitian ini adalah berjumlah 8 orang buruh bangunan pada Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya, 10 orang penerima bantuan, dan 2 orang aparat desa yang mendampingi proses Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya di Desa Sabah Balau Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan.

#### b. Sampel

Sampel merupakan bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *purposive sampling*. *Purposive sampling* merupakan teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu dan syarat-syarat yang dipilih sesuai dengan kriteria yang dikaji dalam penelitian ini. Oleh karena itu, sampel dalam penelitian ini yai-

---

<sup>21</sup> *Ibid.*, h. 225.

tu 6 orang Buruh Bangunan, 2 orang yang menerima Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya, dan 1 orang Aparat Desa.

#### 4. Metode Pengumpulan Data

Mengenai pengumpulan data peneliti menggunakan metode sebagai berikut:

##### a. Metode Wawancara ( Interview).

Wawancara dapat digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menentukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit/kecil.<sup>22</sup>

Dalam melaksanakan wawancara penulis berhadapan secara langsung dengan orang yang diwawancara baik secara terstruktur yang telah mempersiapkan daftar pertanyaan yang sesuai dengan data peneliti.

##### b. Metode Observasi.

Metode observasi adalah teknik pengumpulan data yang mempunyai ciri yang spesifik bila dibandingkan dengan teknik yang lain, yaitu wawancara dan kuesioner. Jika wawancara dan kuesioner selalu berkomunikasi dengan orang, sedangkan

---

<sup>22</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* ....., h. 137.

observasi tidak terbatas pada orang tetapi juga obyek-obyek alam yang lain.<sup>23</sup>

c. Dokumentasi

Metode ini untuk menghimpun atau memperoleh data, dengan peneliti melakukan pencatatan baik berupa benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, catatan harian dan sebagainya.<sup>24</sup>

## 5. Metode Pengolahan Data

Beberapa cara yang penulis gunakan dalam metode ini, yaitu :

a. Pemeriksaan Data (*Editing*)

Pemeriksaan data ialah membenaran apakah data yang terkumpul melalui studi pustaka, studi lapangan dan dokumen sudah dianggap relevan dengan masalah, tidak berlebihan, jelas dan tanpa kesalahan.

b. Sistematika Data (*Sistemizing*)

Sistematika data merupakan suatu cara untuk mengelompokkan data secara sistematis. Data yang tersebut dikelompokkan secara klasifikasi serta secara urutan masalah.

## 6. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang dipakai dalam penelitian ini adalah analisa data kualitatif dengan memakai metode berpikir induktif Metode induktif yaitu berawal dari pengetahuan yang bersifat khusus ke

<sup>23</sup> *Ibid.*, h.145

<sup>24</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2014),h.201



pengetahuan yang bersifat umum. Dalam penelitian ini penulis memperoleh gambaran umum mengenai sistem penetapan upah pekerja bangunan pada Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.

## **I. Sistematika Pembahasan**

Pembahasan hasil penelitian ini akan disistematika menjadi lima bab yang saling berkaitan satu sama lain. Sebelum menempuh bab satu maka pertama-tama terlebih dahulu terdapat halaman sampul, halaman judul, abstrak, halaman persetujuan pembimbing, halaman pengesahan, halaman pernyataan originalitas, halaman motto, halaman persembahan, halaman riwayat hidup, halaman kata pengantar, halaman daftar isi, halaman daftar tabel, serta daftar lampiran.

Bab satu berisi sub bab penegasan judul, latar belakang masalah, fokus dan sub-fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian serta sistematika pembahasan.

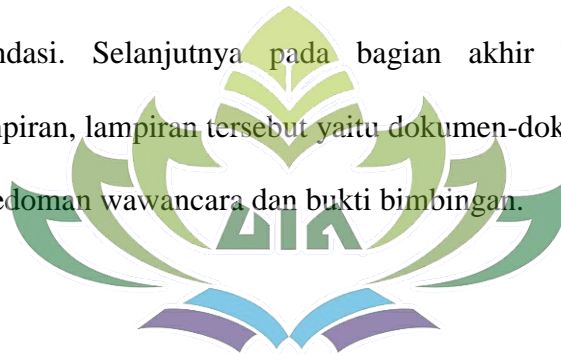
Bab kedua berisi landasan teori yang berkaitan dengan masalah dalam penelitian ini. Oleh karena itu pada bab kedua ini penulis membahas tentang pengertian upah, dasar hukum upah, macam-macam upah, hak menerima upah, sistem pengupahan dalam Islam, berakhirnya akad upah, prinsip-prinsip perjanjian.

Bab ketiga membahas tentang gambaran umum desa Sabah Balau yaitu sejarah desa Sabah Balau, kondisi geografis desa Sabah Balau, data

penduduk desa Sabah Balau, struktur organisasi desa Sabah Balau. Selain itu pada bab ini juga berisi tentang sistem penetapan upah pekerja bangunan dalam program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya.

Bab keempat atau analisis penelitian membahas secara rinci mengenai sistem penetapan upah pekerja bangunan dalam program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya dan membahas secara rinci tinjauan hukum Islam tentang pembayaran upah pekerja bangunan dalam program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya.

Bab kelima yang disebut dengan penutup berisi kesimpulan serta rekomendasi. Selanjutnya pada bagian akhir berisi daftar rujukan sertalampiran, lampiran tersebut yaitu dokumen-dokumen, surat-surat perjanjian, pedoman wawancara dan bukti bimbingan.



## BAB II LANDASAN TEORI

### A. Pengertian Upah

Bentuk kegiatan manusia dalam kehidupan di lapangan muamalah yaitu *ijarah*. Upah dalam bahasa Arab disebut *al-ujrah*. Dari segi bahasa *al-ajru* yang berarti 'iwad (ganti). Dengan kata lain imbalan yang diberikan sebagai upah atau ganti suatu perbuatan.<sup>25</sup>

Upah menurut istilah (terminologi) adalah mengambil manfaat tenaga orang lain dengan jalan memberi ganti atau imbalan menurut syarat-syarat tertentu. Upah adalah memberikan imbalan sebagai bayaran kepada seseorang yang telah diperintah untuk mengerjakan suatu pekerjaan tertentu dan bayaran itu diberikan menurut perjanjian yang disepakati.

*Ijarah* berlaku umum atas setiap akad yang berwujud pemberian imbalan atas sesuatu manfaat yang diambil. Secara garis besarnya *ijarah* terdiri dari beberapa hal. Pertama, apabila yang menjadi objek transaksi adalah manfaat atau jasa dari suatu benda disebut *ijarah al-ain* atau sewa-menyewa, seperti menyewa rumah untuk ditinggali. Kedua, bila yang menjadi objek transaksi adalah manfaat atau jasa dari tenaga seseorang disebut *ijarah al-zimmah* atau upah-mengupah, seperti upah menjahit pakaian

Upah dibayarkan kepada para pekerja sesuai dengan kesepakatan dan manfaat yang diberikan sehingga keduanya terikat dengan suatu

---

<sup>25</sup> Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Rajawali Pers, 1997), h.29

kontrak yang telah disepakati. Salah satu bentuk kegiatan manusia dalam bidang muamalah adalah *Ijarah* yang terambil dari bentuk fi'il "ajara-ya'juru-ajran". Ajaran semakna dengan kata *al-'iwadh* yang mempunyai arti ganti dan upah. Ajaran juga dapat berarti sewa atau upah. *Ijarah* berarti akad untuk beberapa manfaat terhadap pengganti. Oleh karena itu, lafaz *Ijarah* mempunyai pengertian umum yang meliputi upah atas pemanfaatan sesuatu benda atau imbalan sesuatu kegiatan, atau upah karena melakukan sesuatu aktivitas.<sup>26</sup>

Berdasarkan pengertian di atas, kiranya dapat dipahami bahwasannya *Ijarah* adalah menukar sesuatu dengan ada imbalannya, diartikan dalam bahasa Indonesia berarti sewa-menyewa dan upah-mengupah, sewa-menyewa adalah "menjual manfaat" sedangkan upah-mengupah adalah "menjual tenaga atau kekuatan".<sup>27</sup>

Dalam kamus besar Indonesia pengertian upah adalah uang yang dibayarkan sebagai pembalas jasa atau sebagai pembayaran tenaga yang sudah dikeluarkan untuk mengerjakan sesuatu seperti gaji. Upah diberikan kepada orang yang telah melakukan suatu pekerjaan baik berupa jasa maupun tenaga.<sup>28</sup>

Upah adalah harga yang dibayarkan pekerja atas jasanya dalam produksikekayaan, seperti faktor produksi lainnya, tenaga kerja diberi

<sup>26</sup> M. Harir Muzaki & Ahmad Sumanto, Tinjauan Hukum Islam terhadap Upah Pembajak Sawah di Desa Klesm Pacitan, *Jurnal AL 'ADALAH*, Vol. 14, No. 2, 2017. H. 484-485.

<sup>27</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h. 11-115.

<sup>28</sup> Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi Keempat (Jakarta: PT Gramedia, 2011), H.1108

imbalan atas jasanya, dengan kata lain upah merupakan harga dari tenaga yang dibayar atas jasanya dalam produksi.<sup>29</sup>

Pengertian Upah menurut Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 2003 tentang Tenaga Kerja Pasal 1 yaitu Upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja atau buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atau suatu pekerjaan dan jasa yang telah dilakukan.

Untuk lebih jelasnya di bawah ini akan dikemukakan beberapa definisi menurut pendapat para ahli, yaitu sebagai berikut:

1. Nurimansyah Haribuan mendefinisikan bahwa upah adalah segala macam bentuk penghasilan yang diterima buruh (pekerja) baik berupa ataupun barang dalam jangka waktu tertentu pada suatu kegiatan ekonomi.
2. Muchdarsyah Sinungan mendefinisikan bahwa upah kerja pencerminan pendapatan nasional dalam bentuk upah uang yang diterima oleh buruh sesuai dengan jumlah dan kualitas yang dicurahkan untuk pembuatan suatu produk.<sup>30</sup>

<sup>29</sup> Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, Jilid II), H.361

<sup>30</sup> Muchadarsyah Sinungan, *Produktivitas Apa dan Bagaimana*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2000) , h. 90



3. Sadono Sukirno mendefinisikan bahwa upah adalah pembayaran atas jasa-jasa fisik yang disediakan oleh tenaga kerja kepada para pengusaha.<sup>31</sup>

Ada pula yang menerjemahkan, *ujrah* sebagai jual beli jasa (upah mengupah).

Upah dapat diartikan sejumlah uang yang dibayar oleh orang yang memberi pekerjaan kepada seorang pekerja atas jasanya dengan sesuai perjanjian. Menurut fikih muamalah bahwa transaksi uang dengan tenaga kerja manusia disebut *ujrah* atau upah. Dalam pandangan syariat Islam upah adalah hak dari orang yang telah bekerja dan kewaiban orang yang mempekerjakan untuk membayarnya. Upah merupakan hak dari seorang buruh sebagai harga atas tenaga yang telah disumbangkan dalam proses produksi dan pemberi kerja wajib membayarnya.

Allah menghalalkan upah karena upah merupakan kompensasi atas jasa yang telah diberikan seorang pekerja, dan perampasan terhadap upah merupakan perbuatan buruk yang akan mendapat ancaman siksa dari Allah

## B. Dasar Hukum Upah

Beberapa fuqaha sepakat bahwa *ijarah* dibolehkan berdasarkan al-Qur'an, hadis (as-sunnah), dan ijma'. Begitu pun beberapa ulama, seperti Abu Bakar, al-Qasyani, Ibnu Kaisan, Ismail bin Ulayyah, An- Nahrawani, dan Hasan al-Basri. Mereka tidak membenarkan *ujrah*, sebab *ujrah* adalah jual beli kemanfaatan, yang tidak dapat dipegang (tidak ada). Sesuatu yang

---

<sup>31</sup> Sadono Sukirno, *Mikro Ekonomi Teori Pengantar*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), h. 351

tidak ada tidak dapat dikategorikan jual beli. Setelah beberapa waktu barulah manfaat itu dapat dinikmati sedikit demi sedikit. Sedangkan sesuatu yang tidak ada pada waktu akad tidak boleh diperjualbelikan.<sup>32</sup>

## 1. Al- Qur'an

Al-qur'an menurut harfiah berarti "bacaan" adalah sebuah kitab suci utama dalam agama Islam, umat muslim percaya bahwa kitab ini diturunkan oleh Allah. Dalam hukum Islam pengambilan hukum yang pertama harus berdasarkan Al- Quran.

a) Q.S. Al-Baqarah [2] : 233

وَأِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا اتَّيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۚ ۲۳۳

Artinya : *"Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut, bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan". (Q.S. Al-Baqarah[2] : 233 )*

Ayat di atas menjelaskan bahwa dalam membayar upah kepada pekerja harus sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan dan sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati. Jika kalian menghendaki agar bayi-bayi kalian diserahkan kepada wanita-wanita yang bersedia menyusui, maka hal ini boleh dilakukan. Tetapi kalian harus memberikan upah yang sepantasnya kepada mereka, apabila upah diberikan tidak sesuai maka akadnya menjadi tidak sah, pemberi kerja hendaknya tidak curang dalam pembayaran upah harus sesuai

<sup>32</sup> Rachmat Syaife'I, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h.123

dan jelas agar tidak ada salah satu pihak dirugikan dari kedua belah pihak.<sup>33</sup>

b) Q.S An-nisa [4] :135.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ ۚ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَعْدِلُوا ۚ وَإِنْ تَلَوْا أَوْ تَعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانِ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا  
١٣٥

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan.”<sup>34</sup> (Q.S An-nisa [4] :135)

Ayat di atas menjelaskan bahwa, jika ia kaya atau pun miskin, maka Allah lebih mengetahui kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutar balikan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui segala apa yang kamu kerjakan.

c) Q.S Az-Zukhruf [43]: 32

أَمْ يَحْسِبُونَ أَنَّ رَبَّنَا نَحْنُ قَسَمًا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سَخِرِيًّا وَرَحِمَتْ رَبُّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ ٣٢

<sup>33</sup> Ahmad Mustofa Al-Maraghi, *Tafsir Al-maragi, Cet 1* (Semarang: CV Toha Putra, 1984),h.350

<sup>34</sup> Al-Quran dan Terjemahan, Qs An-Nissa (4):135

Artinya: *“Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan kami telah meninggikan sebahagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.”* (Q.S Az-Zukhruf [43]: 32)

Ayat di atas menjelaskan bahwa dalam soal kehidupan didunia sudah ada yang mengaturnya termasuk melebihi sebagian orang-orang atas sebagian lainnya dalam hal kekayaan dan kefakiran, kekuatan dan kelemahan, ilmu dan kebodohan, jika semuanya disamakan maka sebagian mereka tidak dapat mempekerjakan sebagian lainnya, dan tidak seorang pun dapat menundukan yang lain.<sup>35</sup>

d) Q.S An-nahl [16]: 90

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايَ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ٩٠﴾

Artinya : *”Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran”*(Q.S An-Nahl [16]:90)

Ayat di atas menjelaskan bahwa dalam hal ini adil merupakan gambaran keseimbangan dan keharmonisan. Nilai-nilai keadilan menuntut antara lain agar orang memberikan kepada orang lain sesuatu yang menjadi haknya. Oleh karena itu, dalam prinsip keadilan tidak terlepas dari keseimbangan antara hak dan kewajiban.

<sup>35</sup> Ahmad Mustofa Al-Maraghi, *Tafsir Al-maragi, Cet 1 ....*, H. 278

## 2. Hadis

Hadis merupakan perkataan (sabda), perbuatan, ketetapan dan persetujuan dari Nabi Muhammad yang dijadikan landasan syariat Islam. Hadis dijadikan sumber hukum Islam selain Al-Qur'an, dalam hal ini kedudukan hadis merupakan sumber hukum kedua setelah Al-Qur'an.

Selain itu ayat Al-Qur'an di atas, ada beberapa hadis yang menegaskan tentang upah, hadist Rasulullah SAW menegaskan :

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَ عِرْقُهُ (رَوَاهُ ابْنُ مَاجَه) <sup>36</sup>

*“Dari Abdilllah bin Umar ia berkata, berkata Rasulullah Saw : berikan kepada seorang pekerja upahnya sebelum keringatnya kering”* (H.R. Ibnu Majah).

sebaiknya pula agar upah disebutkan secara jelas dan diberitahukan berapa besar atau kecilnya upah pekerja. Hadis riwayat Abu Sa'id Al-Khudri, Rasulullah SAW bersabda :

وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَلْيُسِّمْ لَهُ أَجْرَتَهُ (رَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ) <sup>37</sup>

*“Dari Abu Sa'id Al-Khudri ra. Bahwasannya Nabi Saw bersabda: barang siapa mempekerjakan pekerja maka tentukanlah upahnya”* (H.R. Abdurrazaq).

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ أَجْرِ أَحْجَامٍ فَقَالَ: اخْتَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَجَمَهُ أَبُو طَيْبَةَ وَأَعْطَاهُ صَاعَيْنِ مِنْ طَعَامٍ. (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ) <sup>38</sup>

<sup>36</sup> Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram*, (Jakarta: Darul Haq, 2015), h.490

<sup>37</sup> *Ibid*

<sup>38</sup> Muhammad bin Isma'il al-Bukhari, *Shahih Al-Bukhari*, Juz. VII, No. 5696 (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 2004), h. 125.



“Dari Anas ra. Sesungguhnya ketika ditanya mengenai upah dari bekerja membekam, dia mengatakan: Rasulullah Saw dibekam oleh Thaibah, dan beliau memberinya imbalan, sebanyak dua sak makanan (H.R. Bukhari)

Allah memusuhi orang-orang yang melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama, seperti dalam hadist yang diriwayatkan Muslim, sebagai berikut :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: قَالَ  
اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ رَجُلٌ أُعْطِيَ نِي تَمَّ غَدَرٌ وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ  
ثَمَنَهُ وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَاسْتَوَفَ مِنْهُ وَلَمْ يُعْطِ أَجْرَهُ (رَوَاهُ أَبِي  
هُرَيْرَةَ)<sup>39</sup>

“Abu Hurairah ra berkata, Rasulullah Saw bersabda: tiga golongan yang aku musuhi kelak di hari kiamat ialah seseorang yang memberi pinjaman dengan namaku, kemudian ia berkhianat, seseorang yang menjual orang merdeka dan menikmati hasilnya, dan seseorang yang mempekerjakan kuli, lalu pekerja itu bekerja dengan baik namun ia tidak memenuhi upahnya.” (H.R. Abu Hurairah)

### 3. Ijma

Ijma adalah kesepakatan para ulama dalam menetapkan suatu hukum dalam agama berdasarkan Al-Qur'an dan Hadist dalam suatu perkara yang terjadi. Umat Islam pada masa sahabat telah ber ijma bahwa ijarah dibolehkan sebab bermanfaat bagi manusia.<sup>40</sup>

Ibnu Rusyd dalam kitab Bidayah Al-Mujtahid, juga mengatakan bahwa “sesungguhnya sewa menyewa itu dibolehkan oleh seluruh *fuqaha* negeri besar dan *fuqaha* masa pertama”. *Al-Ijarah* merupakan

<sup>39</sup> Muhammad bin Ismail Abu Abdullah Al-Bukhari, *Shohih Al-Bukhari*, (Digital Library, *al-Maktabah al-Syamilah al Isdar al-Sani*, 2005), Hadis n0. 2227

<sup>40</sup> H. Abd. Rahman Dahlan, M.A., *Ushul Fiqh Cetakan Pertama* (Jakarta:2010), h.145-146.

akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri.<sup>41</sup> Transaksi ini dapat meringankan yang dihadapi manusia dan termasuk salah satu bentuk aplikasi tolong menolong yang dianjurkan agama. Konsep akad ini merupakan manifestasi keluwesan hukum Islam untuk menghilangkan kesulitan dalam kehidupan manusia.

Berdasarkan uraian di atas tentang dasar hukum atau dalil-dalil syara' dan juga dasar perundang-undangan yang berkenaan dengan masalah pengupahan, maka tidak ada lagi keraguan tentang kebolehan mengadakan transaksi sewa-menyewa atau upah-mengupah, dengan kata lain sewa-menyewa atau upah-mengupah dibolehkan dalam hukum Islam maupun perundang-undangan apabila bernilai syar'i dan tidak merugikan pihak pekerja/buruh.

### C. Rukun dan Syarat Upah

Rukun adalah unsur-unsur yang membentuk sesuatu itu terwujud karena adanya unsur-unsur tersebut yang membentuknya. Misalnya rumah, terbentuk karena adanya unsur-unsur yang membentuknya, yaitu pondasi, tiang, lantai, dinding, atap, dan seterusnya. Dalam konsep Islam unsur-unsur yang membentuk itu disebut rukun.<sup>42</sup>

<sup>41</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h.117.

<sup>42</sup> Muhammad Al Albani, *Shahih Sunan Ibnu Majah*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007),

Menurut Jumhur ulama, rukun dan syarat upah ada empat (4) yaitu:

1. *Aqid* (orang yang berakad)

Orang yang berakad yaitu orang yang melakukan akad sewa-menyewa atau upah-mengupah. *Mua'jir* adalah orang yang memberi upah, sedangkan *musta'jir* adalah orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu (buruh/pekerja).<sup>43</sup> Persyaratan orang yang berakad untuk kedua belah pihak yang melakukan akad disyaratkan berkemampuan yaitu, kedua-duanya berakal, saling meridhai dan dapat membedakan. Menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah, jika salah seorang berakad itu gila atau anak kecil menyewakan harta mereka atau diri mereka (sebagai buruh), maka akad menjadi tidak sah.

2. *Sighat*

Pernyataan kehendak yang lazimnya disebut *sighat* akad (*Sighatul 'aqad*), terdiri atas *ijab* dan *qabul* dapat melalui :

- a. Ucapan
- b. Utusan dan tulisan
- c. Isyarat
- d. Secara diam-diam
- e. Dengan diam-diam semata. Syarat-syaratnya sama dengan *ijab* dan *qabul* pada jual beli hanya saja dalam upah harus menyebutkan masa atau waktu yang ditentukan.<sup>44</sup>
- f.

<sup>43</sup> Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah, *Fiqh Muamalah*, Cet Ke-1, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), h.170

<sup>44</sup> Moh. Saefulloh, *Fikih Islam Lengkap*, (Surabaya: Terbit Terang, 2005), h.178

### 3. *Ujrah* / Upah

Yaitu yang menjadi objek dalam upah mengupahatau sesuatu yang dikerjakan adalah sesuatu yang diperbolehkan menurut agama (Islam). Adapun syarat-syarat dalam pembayaran upah (*ujrah*) adalah sebagai berikut :

- a. Tidak berkurang nilainya.
- b. Harus jelas, artinya sebelum pekerjaan dilaksanakan upahnya harus ditentukan dengan pasti terlebih dahulu.
- c. Adanya manfaat yang jelas.
- d. *Ma'qud alaihi* (barang yang menjadi objek) ialah sesuatu yang dikerjakan dalam upah mengupah, disyaratkan pada pekerjaan yang dikerjakan dengan beberapa syarat. Adapun salah satu syarat terpenting dalam transaksi ini adalah bahwa jasa yang diberikan jasa halal.<sup>45</sup>

Rasulullah Saw sendiri diriwayatkan pernah meminta orang Yahudi sebagai penulis dan penerjemah dan beliau juga pernah meminta orang musyrik sebagai penunjuk jalan.

Ali bin Abi Thalib diminta oleh orang Yahudi untuk menyirami kebun dengan upah tiap satu timba sebutir kurma.

Adapun menurut ulama Hanafiyah, Rukun ijarah adalah ijab dan qabul antara lain dengan menggunakan kalimat: *al-Ijarah*, *al-Isti'jar*, *al-Ikhtira*, dan *I-Ikra*, adapun golongan Syafi'iyah, Mal-

---

<sup>45</sup> Syafei Rachmat, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001), h.129

ikiyah dan Hambaliyah berpendapat bahwa rukun ijarah itu terdiri atas *muajjir* (pihak yang memberikan upah), *musta'jir* (orang yang membayar upah), *al-Ma'qud* dan *shighat*.<sup>46</sup> Sedangkan jumhur ulama hanya mengatakan ada empat yaitu *Aqid* (orang yang berakad), *shighat* (ijab qabul), *al-ijarah* (upah), dan *Ma'qud 'alaihi* (manfaat barang yang disewakan atau sesuatu yang dikerjakan).

Menurut ulama Mazhab Hanafi, rukun yang dikemukakan oleh jumhur ulama di atas, bukan rukun tetapi syarat.

Sebagai sebuah transaksi umum, *al-ijarah* baru dianggap sah apabila telah memenuhi rukun dan syaratnya, sebagaimana yang berlaku secara umum dalam transaksi lainnya. Adapun syarat-syarat upah-mengupah adalah sebagai berikut :<sup>47</sup>

1. Syarat terjadinya akad (*syarat in'inqad*).

Syarat ini berhubungan dengan orang yang melakukan akad. Syarat utama bagi pihak yang melakukan *ijarah* ialah berakal sehat dan pihak yang melakukan *ijarah* itu haruslah orang yang memiliki kecakapan bertindak yang sempurna mampu membedakan mana perbuatan yang baik dan perbuatan yang buruk. Oleh karena itu, orang yang tidak sehat atau gila dan orang yang belum mumayyiz tidak sah melakukan *ijarah*. Begitu pula dengan orang yang mabuk dan orang yang tiba-tiba hilang ingatannya, tidak sah melakukan *ijarah* ketika orang tersebut da-

<sup>46</sup> Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta:PT. Raja Grafindo,1993), h.34

<sup>47</sup> Ghufuran A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Koseptual*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), h.186



lam keadaan sakit. Oleh sebab itu, sangat perlunya kecakapan bertindak dalam melakukan suatu akad, maka golongan Syafi'iyah dan Hanabilah menambahkan bahwa para pihak yang melakukan akad itu haruslah orang yang sudah dewasa dan tidak cakap hanya sekedar sudah mumayyiz saja.<sup>48</sup>

## 2. Syarat pelaksanaan *ijarah* (*syarat al-nafadz*)

Akad *ijarah* dapat terlaksana bila ada kepemilikan dan penguasaan, karena tidak sah akad *ijarah* terhadap barang milik atau sedang dalam penguasaan orang lain. Tanpa adanya kepemilikan dan atau dalam penguasaan, maka *ijarah* tidak sah.

## 3. Syarat sah (*syarat al-shihah*)

Keabsahan *ujrah* sangat berkaitan dengan *aqid* (orang yang berakad), *ma'qud alaih* (barang yang menjadi objek akad), *ujrah* (upah), dan zat akad (*nafs al-'aqad*), yaitu :<sup>49</sup>

### a. Adanya keridhaan dari kedua belah pihak yang akad

Dalam hal ini tidak dibolehkan melakukan akad *ujrah* jika adanya salah satu pihak atau bahkan keduabelah pihak tidak didasari suka rela ataudalam keadaan terpaksa, baik keterpaksaan itu timbulnya dari pihak-pihak yang melakukan akad maupun dari pihak lain.

<sup>48</sup> Helmi Karim, *Fiqh Muamalah* ....., h.34-35

<sup>49</sup> Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer* (Jakarta : Rajawali Pers, 2016), h. 106

Syarat ini didasarkan pada firman Allah SWT : Q.S An-Nisa[4] : 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ  
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ  
رَحِيمًا ۚ ٢٩

Artinya :” wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.”

Oleh karena itu tidak boleh mempekerjakan orang secara paksa, tidak boleh menganiaya *ajjir*, untuk menghalang-halangi haknya atau mengulur-ulur pembayarannya, atau mengambil sesuatu kemanfaatan darinya tanpa *iwadh* atau upah, itu sama saja memperbudak sebagaimana dikatakan oleh fuqaha Islam yang disimpulkan dari sebuah hadis yang dianggap orang yang “memakan” tenaga dan jerih payah seseorang pekerjasama saja seperti seseorang menjual orang yang berstatus merdeka dan memakan harga hasil penjualan itu.<sup>50</sup>

b. *Ma'aqud Alaih* bermanfaat dengan jelas

Adanya kejelasan pada *ma'qud alaih* (barang) menghilangkan pertentangan diantara aqid. Diantara cara untuk mengetahui *ma'qud alaih* (barang) adalah dengan menjelaskan manfaatnya, pembatasan waktu, atau men-

<sup>50</sup> Wabih Az-Zuhaili, *Fiqh Islam 7 WaAdillatuhu* (Jakarta : Gema Insani, 2011), h. 84

jelaskan jenis pekerjaan jika *ijarah* atas pekerjaan atau jasa seseorang.

- c. Tidak menyewa untuk pekerjaan yang diwajibkan kepadanya.

Bila *ijarah* berupa sewa tenaga atau jasa, maka pekerjaan yang dilakukan bukan merupakan suatu kewajiban bagi orang yang menyewakan jasa atau tenaga tersebut. Berdasarkan syarat ini, maka tidak sah apabila *ijarah* atau menyewa jasa seseorang untuk shalat fardhu, puasa, dan lain-lain karena itu suatu kewajiban seorang mukmin. Juga dilarang menyewa istri sendiri untuk melayaninya sebab hal itu merupakan kewajiban seorang istri. Ulama kontemporer berfatwa bagi para pengajar Al-Qur'an diperbolehkan mengambil upah atau uang jasa, Imam Malik dan Syaf'I berpendapat bahwa diperbolehkan sewa jasa pengajar Al-Qur'an.

- d. Syarat yang berkaitan dengan upah atau uang

Dalam akad *ijarah* harus jelas, tertentu dan bernilai harta. Oleh sebab itu, para ulama sepakat menyatakan bahwa khamar dan babi tidak boleh menjadi upah dalam akad *ijarah* karena kedua benda itu tidak bernilai harta dalam Is-

lam.<sup>51</sup> Adapun syarat-syarat yang berkaitan dengan upah (*ujrah*) adalah sebagai berikut :

- 1) Upah (harta yang dibayarkan) harus suci bukan benda najis. Akad sewa (*ijarah*) tidak sah jika upah (bayaran) nya adalah anjing, babi, kulit bangkai yang belum dimasak, atau khamar. Semua benda-benda najis.<sup>52</sup>
- 2) Upah harus dapat dimanfaatkan. Sesuatu yang tidak bermanfaat tidak sah dijadikan upah, baik karena hina (menjijikan), seperti serangga dan dua biji gandum karena berbahaya seperti binatang-binatang buas, maupun karena diharamkan pemakaiannya secara syariat, seperti alat-alat permainan (yang melalaikan), patung, dan gambar-gambar. Benda-benda di atas tidak sah ditukarkan dengan harta yang bernilai. Oleh sebab itu barang-barang tersebut tidak boleh ditukarkan dengan sesuatu yang tidak bernilai.<sup>53</sup>
- 3) Upah harus dapat diserahkan. Oleh karena itu, tidak boleh mengupah dengan burung yang masih terbang di udara atau ikan yang masih ada di air, juga tidak boleh mengupah dengan harta yang sudah dirampok (*dighasab*), kecuali upah diberikan kepada orang yang

---

<sup>51</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta : Gaya Media Pratama, 2007), h.235

<sup>52</sup> Mustafa Dib Al Bugha, *Buku Pintar Transaksi Syariah* (Damaskus : Darul Musthafa, 2009), h. 159

<sup>53</sup> *Ibid*

memegang harta *ghasab* itu memungkinkan untuk diambil kembali.

4) Orang yang berakad hendaknya memiliki kuasa untuk menyerahkan upah itu. Baik karena harta itu berupa hak milik maupun *wakalah* (harta yang dikuasakan). Jika upah tidak berada di bawah kuasa orang yang berakad, ia tidak sah dijadikan upah

5) Upah harus berupa *muttaqawwin* yang diketahui. Syarat ini disepakati oleh para ulama. Syarat *mal muttaqawwin* diperlukan dalam *ijarah*, karena upah (*ujrah*) merupakan harta atas manfaat, sama seperti harga barang dalam jual beli.

Kejelasan tentang upah ini untuk menghindari perselisihan kedua belah pihak. Penentuan upah atau sewa ini boleh didasarkan kepada *urf* atau adat kebiasaan. Oleh karena itu, tidak boleh menyewa rumah dengan bayaran merenovasi bagian-bagian yang perlu diperbaiki, menyewa hewan tunggangan dengan imbalan memberinya makan.<sup>54</sup>

Termasuk upah yang tidak jelas adalah membayar upah dengan sesuatu yang dihasilkan dari pekerjaan yang disewa. Misalnya, seorang disewa untuk menyembelih dan menguliti kambing dengan imbalan kulitnya atau bagian lain dari kambing

---

<sup>54</sup> Ahmad WadiMuslich, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: AMZAH, 2010), h. 326



itu. Transaksi ini tidak sah karena belum diketahui seberapa tebal kulit kambing itu atau seberapa banyak bagian yang akan dijadikan upah.

#### D. Macam-macam Upah

Di dalam fiqh Muamalah upah dapat diklasifikasikan menjadi dua :

1. Upah yang telah disebutkan (*ajrun muammah*) adalah upah yang sudah disebutkan itu syaratnya ketika disebutkan harus disertai kerelaan belah pihak yang berakad.
2. Upah yang sepadan (*ajrun misli*) adalah upah yang sepadan dengan kerjanya sesuai dengan kondisi pekerjaannya (profesi pekerjaan), jika *ijarah* kerjanya telah menyebutkan jasa (manfaat) dari pekerjaannya orang yang menentukan upah tersebut (*ajrun misli*) adalah mereka yang mempunyai keahlian atau kemampuan untuk menentukan bukan standar yang ditentukan oleh negara, juga bukan kebiasaan penduduk suatu negara, melainkan oleh orang yang ahli dalam menangani upah kerja (*khubarau*).<sup>55</sup>

Dari segi objek, akad al-ijarah dibagi menjadi dua macam :

- a. *Ijarah* manfaat (*al-ijarah ala al-manfa'ah*), misalnya sewa-menyewa rumah, kendaraan, pakaian, dan perhiasaan. Dalam hal ini *mu'ajiir* mempunyai benda-benda tertentu dan *musta'jjir* butuh benda tersebut dan terjadi kesepakatan antara keduanya, dimana *mu'ajjir* mendapat imbalan tertentu dari *musta'jjir*, dan *musta'jjir*

<sup>55</sup> M.I. Yusanto Dan M.K. Widjajakusuma, *Menggagas Bisnis Islam*, Cet. I, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), h. 67.

mendapat manfaat dari benda tersebut. Apabila manfaat itu yang dibolehkan syara' untuk dipergunakan, maka para Ulama fiqh sepakat menyatakan boleh dijadikan akad sewa-menyewa.

- b. *Ijarah* yang bersifat pekerja (*ijarah ala al-a'mal*) ialah dengan cara mempekerjakan seorang untuk melakukan suatu pekerjaan. *Ijarah* seperti ini menurut Ulama fiqh, hukumnya boleh apabila jenis pekerjaan itu jelas, seperti buruh bangunan, tukang jahit, buruh pabrik, dan buruh tani. *Mu'ajjir* adalah yang mempunyai keahlian, tenaga, atau jasa tersebut dengan imbalan tertentu. *Mu'ajjir* mendapat upah atas tenaga yang dikeluarkan untuk *musta'jjir* mendapatkan tenaga atau jasa dari *mu'ajjir*.<sup>56</sup>

Upah mengupah atau *ijarah'ala al-a'mal*, yakni jual beli jasa, biasanya berlaku dalam beberapa hal seperti menjahit pakaian, membangun rumah, dan lain-lain. *Ijarah 'ala al-a'mal* terbagi dua yaitu :

- 1) *Ijarah* khusus, yang dilakukan oleh seorang pekerja. Hukum seorang yang bekerja itu tidak boleh bekerja selain dengan orang yang telah memberinya upah. Contoh: A mempekerjakan B, selama B bekerja ditempat A dengan kesepakatan yang telah ditentukan, maka B tidak boleh menerima pekerjaan dari orang lain selama pekerjaan B tersebut belum selesai, Dalam arti lain *ijarah* khusus ini mengikat seseorang agar

---

<sup>56</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam* (Fiqh Muamalat). (Jakarta :PT Raja Grafindo Persada, 2003), h.236

tidak menerima pekerjaan lain sampai jangka waktu habis yang telah ditentukan oleh kedua belah pihak.<sup>57</sup>

- 2) *Ijarah* musytarik, yaitu *ijarah* yang dilakukan secara bersama-sama, atau melalui kerjasama. Hukumnya dibolehkan kerjasama dengan orang lain. Contohnya : A dan 6 orang saudaranya menerima pekerjaan dari B, untuk menggali sumur, maka selama A dan 6 saudaranya bekerja ditempat B ada orang lain menyuruh A untuk membenarkan TV nya yang rusak, maka A boleh menerima pekerjaan tersebut.

#### E. Hak Menerima Upah

Hak *ijarah* itu suatu pekerjaan, maka kewajiban pembayaran upahnya pada waktu berakhirnya pekerjaan. Bila tidak ada pekerjaan lain, jika akad sudah berlangsung dan tidak disyaratkan mengenai pembayaran dan tidak ada ketentuan penangguhannya.

Secara umum dalam ketentuan Al-Qur'an yang ada keterkaitannya dengan penentu upah di jumpai dalam firman Allah SWT dalam surat An-Nahl ayat 90 :

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَائِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ٩٠ ﴾

Artinya :” sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dn berbuat kebajikan,memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran (Q.S. An-Nahl ayat 90)

<sup>57</sup> Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam Jilid 2*, (Penerbit Dana Bakti Wakaf), h. 361

## F. Sistem Pengupahan Dalam Islam

Upah dalam konsep syariah memiliki dua dimensi yaitu dimensi dunia dan dimensi akhirat. Untuk menjelaskan upah dalam dimensi dunia maka konsep moral merupakan hal yang sangat penting agar pahala dapat diperoleh dimensi akhirat dari upah tersebut. Jika moral diabaikan maka dimensi akhirat tidak dapat tercapai. Oleh karena itu konsep moral diletakan pada kotak yang paling luar, yang artinya konsep moral diperlukan untuk menerapkan upah dimensi dunia agar upah dimensi akhirat dapat tercapai.

Dimensi dunia dapat dicirikan oleh dua hal yaitu adil dan layak, adil bermakna bahwa upah yang harus diberikan harus jelas, transparan, dan proposional. Layak bermakna bahwa upah yang diberikan harus mencukupi kebutuhan pangan, sandang, dan papan serta tidak jauh dibawah pasaran.<sup>58</sup>

Islam menawarkan suatu penyelesaian yang sangat baik atas masalah upah dan menyelesaikan kepentingan kedua belah pihak,<sup>59</sup> kelas pekerja dan para majikan tanpa melanggar hak-hak yang sah dari majikan. Seorang majikan tidak membenarkan bertindak kejam terhadap kelompok pekerja dengan menghilangkan hak sepenuhnya dari bagian mereka. Upah ditetapkan dengan cara yang paling tepat tanpa harus menindas pihak manapun. Setiap pihak memperoleh bagian yang sah dari hasil kerjasama mereka tanpa adanya ketidakadilan terhadap pihak lain. Prinsip

<sup>58</sup> Hasbiyallah, *Fikih* (Bandung: Grafindo Media Pertama, 2008), h.71

<sup>59</sup> Afzalur Rahman., *Doktrin Ekonomi Islam Jilid 2* ....., h.362

## **BAB V PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pada bab-bab sebelumnya maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Praktik pembayaran upah pada program bantuan stimulan perumahan swadaya dalam waktu 120 hari dengan pembayaran sebesar Rp. 2.500.000 diberikan oleh pemerintah pada saat pembangunan telah mencapai 40%. Kemudian pihak penerima bantuan memberikan janji kepada tukang bangunan bahwa akan adanya penambahan upah dari uang pribadinya. Namun pada praktiknya penambahan upah tersebut tidak diberikan juga bahkan sampai pembangunan rumah selesai.
2. Menurut Tinjauan hukum Islam praktik pembayaran upah pada program bantuan stimulan perumahan swadaya tidak sesuai dengan hukum syara'. Hal ini dikarenakan penerima bantuan tidak memberikan upah tambahan sehingga upah yang telah diberikan di awal dianggap kurang/ tidak memenuhi standar upah pada normalnya. Akibatnya tukang bangunan merasa dirugikan dan tidak ridha atas upah yang telah diberikan Sedangkan salah satu syarat yang telah dijelaskan pada syarat upah adalah kedua belah pihak harus saling rela dan tidak merugikan diri sendiri maupun orang lain. Sehingga dapat menimbulkan adanya perselisihan antara kedua belah pihak.

## B. Rekomendasi

1. Untuk pihak penerima bantuan maupun tukang bangunan sebaiknya lebih memahami rukun dan syarat upah yang sesuai dengan hukum Islam agar tidak ada perilaku yang semena-mena dari salah satu pihak dan tidak menimbulkan kesalah pahaman.
2. Untuk kedua belah pihak sebaiknya melakukan musyawarah terlebih dahulu mengenai kejelasan upah yang akan disepakati. Agar kedua belah pihak saling ridha dan tidak menimbulkan kerugian.
3. Untuk penerima bantuan sebaiknya memberikan upah tambahan dikarenakan waktu 120 hari cukup lama sehingga menguras tenaga tukang bangunan.





## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-Asqalani. *Bulughul Maram*, Jakarta: Darul Haq. 2015.
- Al-Maraghi Mustofa Ahmad. *Tafsir Al-Maragi Cet 1*, Semarang: CV Toha Putra. 1984
- Al-Albani, Muhammad. *Shahih Sunan Ibnu Majah*, Jakarta: Pustaka Azzam. 2007.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta. 2014.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam 7 WaAdillatuhu*, Jakarta : Gema Insani. 2011.
- Dib Al Bugha, Mustafa. *Buku Pintar Transaksi Syariah*, (Damaskus : Darul Musthafa. 2009
- Hakim, Lukman. *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*, Jakarta: Erlangga. 2012.
- Haroen, Nasrun. *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama. 2007.
- Hasan, M. Ali. *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*; Fiqh Muamalat, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2003.
- Hasbiyallah. *Fikih*, Bandung: Grafindo Media Pertama. 2008
- Huda, Nurul. Dan Mustafa Edwin Nasution, *Ekonomi Makro Islam Pendekatan Teoritis* Jakarta: Kencana. 2008.
- Ja'far, A. Khumedi. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Bandar Lampung: Permatanet Publishing. 2016.
- Karim, Helmi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada. 1997.
- Lubis, Ibrahim. *Ekonomi Ekonomi Suatu Pengantar* , Jakarta: Kalam Mulia. 1995.
- Mahmudah, Siti. *Historisitas Syari'ah* ( Kritik Relasi-Kuasa Khalil ' Abd al-Karim). Yogyakarta: LkiS Pelangi Aksara. 2016.
- Mardani. *Hukum Bisnis Syariah*, Jakarta: Kencana. 2014.
- Manan, Abdul. *Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, Jakarta: Kencana. 2016.

M.K. Widjajakusuma, M.I. Yusanto *Menggagas Bisnis Islam*, Cet. I. Jakarta: Gema Insani Press. 2002.

Moleong, Lexi J. *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosda Karya. 1995

Muhammad bin Isma'il al-Bukhari. *Shahih Al-Bukhari*, Juz. VII, No. 5696 , Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah. 2004.

Muhammad bin Ismail Abu Abdullah Al-Bukhari. *Shohih Al-Bukhari*, Hadis no. 2227, Digital Library, *al-Maktabah al-Syamilah al Isdar al-Sani*. 2005.

Mudjib, Abdul. *Kaidah-Kaidah Ilmu Fiqh (Al-Qowa 'idul Fiqhiyah)*, Jakarta: Kalam Milia. 2001.

Muslich, Ahmad Wardi. *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Amzah. 2010.

Mustofa, Imam. *Fiqh Muamalah Kontemporer*, Jakarta : Rajawali Pers. 2016.

Nawawi, Ismail. *Fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2017.

Rahman, Afzalur. *Doktrin Ekonomi Islam Jilid 2*, Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf

Saefulloh, Moh. *Fikih Islam Lengkap*, Surabaya: Terbit Terang. 2005.

Sahrani, Sohari dan Ru'fah Abdullah. *Fiqh Muamalah Cet Ke-1*, Bogor: Ghalia Indonesia. 2010

Sinungan, Muchadarsyah. *Produktivitas Apa dan Bagaimana*, Jakarta: Bumi Aksara. 2000.

Soepomo, Imam. *Pengantar Hukum Islam*, Jakarta: Djambatan. 1994.

Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Rajawali Pers. 2014.

Sukirno, Sadono. *Mikro Ekonomi Teori Pengantar*, Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2005.

Syafe'i, Rachmat. *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia. 2001.

Zuhdi, Masjfuk. *Studi Islam Muamalah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2019.

## **PERATURAN**

Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat RI Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah Pasal 1

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenaga Kerja.

## **JURNAL**

Muzaki, M. Harir & Ahmad Sumanto, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Upah Pembajak Sawah di Desa Klesm Pacitan*, Jurnal AL\_ 'ADALAH, Vol. 14, No. 2, 2017.

## **NASKAH ILMIAH (SKRIPSI) ATAU YANG TIDAK DIPUBLIKASI**

Binti Masitoh, “ *Tinjauan Hukum Islam Tentang Upah Bagi Tokoh Agama*” (Skripsi UIN Raden Intan Lampung, Lampung, 2019)

Indah Tri Oktavia, “*Sistem Perhitungan Upah Pada Pembuatan Sulam Usus Perspektif Etika Bisnis Islam*” (Skripsi IAIN Metro, 2018)

Lia Dwi Dana, “*Tinjauan Hukum Islam Tentang Upah Sebagai Pekerja Pramusaji Bar*” (Skripsi UIN Raden Intan Lampung, Lampung, 2019)

## **WAWANCARA**

Wawancara dengan Bapak Yahya sebagai aparat desa pendamping program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya pada tanggal 30 April 2021

Wawancara dengan Bapak Sariyo sebagai tukang buruh bangunan pada tanggal 30 April 2021

Wawancara dengan Bapak Yuyun sebagai penerima bantuan pada tanggal 30 April 2021

Wawancara dengan Bapak Yadi sebagai penerima bantuan pada tanggal 30 April 2021

Wawancara dengan Bapak Pardi sebagai tukang buruh bangunan tanggal 30 April 2021

Wawancara dengan Bapak Sukir sebagai tukang buruh bangunan tanggal 30 April 2021

Wawancara dengan Bapak Surya sebagai tukang buruh bangunan tanggal 30 April 2021

Wawancara dengan Bapak Edi sebagai tukang buruh bangunan tanggal 30 April 2021

Wawancara dengan Bapak Jangkung sebagai tukang buruh bangunan tanggal 30 April 2021



pemerataan terhadap semua makhluk tercantum dalam (Q.S Al-Baqarah [2]:279)

لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ٢٧٩

Artinya : “*kamu tidak menganiaya dan tidak pula dianiaya*”(Q.S Al – Baqarah[2]:279)

Dalam perjanjian (tentang upah) kedua belah pihak diperintahkan untuk bersikap jujur dan adil dalam semua urusan mereka, sehingga tidak terjadi tindakan aniaya terhadap orang lain dan tidak merugikan kepentingan diri sendiri. Penganiayaan terhadap pekerja istilah jika para majikan tidak membayar secara adil dan bagian yang sah dari hasil kerjasama sebagai jatah dari hasil kerja mereka tidak mereka peroleh. Sedangkan yang dimaksud dengan penganiayaan terhadap majikan yaitu mereka paksa oleh kekuatan industri untuk membayar upah para pekerja melebihi dari kemampuan mereka. Oleh karena itu Al-Qur'an memerintahkan kepada para majikan untuk membayar para pekerja dengan bagian yang seharusnya mereka terima sesuai kerja mereka, dan pada saat yang sama dia telah menyelamatkan kepentingannya sendiri. Dan jika dia tidak mampu mengikuti anjuran Al-Qur'an ini maka dia akan dihukum di dunia ini oleh Negara Islam dan dihari kemudian oleh Allah. Demikian pula para pekerja akan dianggap penindas jika dengan memaksa majikan untuk membayar melebihi kemampuannya. Prinsip keadilan yang sama tercantum dalam (Q.S Al Jaatsiyah [45]:22.)

وَخَلَقَ اللَّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَلِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ٢٢

Artinya: *“Dan Allah menciptakan langit dan bumi dengan tujuan yang benar dan agar dibalasi tiap-tiap diri terhadap apa yang dikerjakannya, dan mereka tidak akan dirugikan.”*(Q.S Al Jaatsiyah [45]:22)

Prinsip dasar ini mengatur kegiatan manusia karena mereka akan diberi balasan di dunia dan di akhirat. Setiap manusia akan mendapat imbalan dari apa yang telah dikerjakan dan masing-masing tidak akan dirugikan, ayat ini menjamin tentang upah yang layak setiap pekerja sesuai dengan apa yang telah disumbangkan dalam proses produksi, jika ada pengurangan dalam upah mereka tanpa diikuti oleh berkurangnya sumbangsih mereka hal itu dianggap ketidakadilan dan penganiayaan. Ayat ini memperjelas bahwa upah setiap orang harus ditentukan berdasarkan kerjanya dan sumbangsihnya dalam kerjasama dan untuk itu harus dibayar tidak kurang, juga tidak lebih dari apa yang telah dikerjakan.

Tentang prinsip ini disebut lagi dalam Q.S Al Ahqaf [46]:19

وَلِكُلِّ دَرَجَةٍ مِّمَّا عَمِلُوا وَلِيُوفيَهُمْ أَعْمَالُهُمْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ١٩

Artinya :*“dan setiap orang memperoleh tingkatan sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan, dan agar Allah mencukupkan balasan perbuatan mereka, dan mereka tidak dirugikan”*(Q.S Al-Ahqaf [46]:19)

Islam juga mendorong umatnya untuk bekerja dan memproduksi bahkan menjadikannya sebagai sebuah kewajiban terhadap orang-orang



yang mampu, lebih dari itu Allah akan memberi balasan yang setimpal yang sesuai dengan amal/kerjanya.<sup>60</sup> Salah satu upaya untuk melindungi hak pekerja, dikenal dengan adanya kesepakatan kerja antara tenaga kerja (*mua'jjir*) dengan dengan orang yang mempekerjakan (*musta'jir*). Berikut hal-hal yang terkait dengan kesepakatan kerja:<sup>61</sup>

### 1. Ketentuan kerja

*Ijarah* adalah memanfaatkan jasa seseorang yang dikontrak untuk dimanfaatkan tenaganya. Oleh karena itu dalam kontrak kerjanya harus ditentukan bentuk kerjanya, waktu, upah, serta tenaganya.<sup>62</sup> Jenis pekerjaannya harus dijelaskan sehingga tidak kabur, karena transaksi *ijarah* yang masih kabur hukumnya adalah fasid (rusak). Dan waktunya harus ditentukan, misalnya harian, bulanan, atau tahunan. Selain itu upah kerjanya harus ditetapkan.

### 2. Bentuk kerja

Tiap pekerjaan yang halal maka hukum mengontraknya juga halal. Di dalam *ijarah* tersebut harus tertulis jenis atau bentuk pekerjaan yang harus dilakukan seorang *ajir*.

### 3. Waktu kerja

Dalam transaksi *ijarah* harus disebutkan jangka waktu pekerjaan itu yang dibatasi oleh jangka waktu berlakunya perjanjian atau

---

<sup>60</sup> Nurul Huda Dan Mustafa Edwin Nasution, *Ekonomi Makro Islam Pendekatan Teoritis* (Jakarta: Kencana, 2008), h. 227

<sup>61</sup> *Ibid.*, h. 229

<sup>62</sup> *Ibid.*, h. 229

selesainya pekerjaan tertentu. Selain itu harus ada juga perjanjian waktu bekerja bagi *ajir*.

#### 4. Gaji kerja

Disyaratkan juga honor transaksi *ijarah* tersebut jelas dengan bukti dan ciri yang bisa menghilangkan ketidakjelasan. Kompensasi *ijarah* boleh tunai dan boleh juga tidak dengan syarat harus jelas.

Islam mengangkat tenaga kerja dan menyuruh orang untuk bekerja, baik bekerja untuk mencapai penghidupan yang layak dan menghasilkan barang-barang dan jasa-jasa yang menjadi keperluan manusia, demikian juga amal ibadah kepada Allah SWT. Adapun hak-hak kewajiban tenaga kerja adalah sebagai berikut:

##### a. Kerja adalah hak buruh

Pemerintah wajib membuka lapangan kerja bagi rakyat terutama rakyat yang tidak mampu mendapatkan kerja atau membuka lapangan kerja sendiri.<sup>63</sup>

##### b. Kerja merupakan kewajiban

Melaksanakan pekerjaan merupakan fardhu yang ditetapkan oleh Allah untuk memperoleh penghidupan dan kerja itu dapat menghapuskan dosa-dosa dan merupakan suatu ibadah, apabila ketika bekerja senantiasa memelihara ketakwaan kepada Allah SWT.

---

<sup>63</sup> Ibrahim Lubis, *Ekonomi Ekonomi Suatu Pengantar* (Jakarta: Kalam Mulia, 1995), h. 313.

c. Majikan bertanggung jawab tentang pembayaran upah

Upah wajib dibayar terhadap majikan berdasarkan perjanjian kerja, perjanjian kerja tentu didasarkan pada kemampuan, keahlian, dan kecermatan dalam bekerja.<sup>64</sup>

d. Upah buruh wajib tertentu dan tidak boleh ada unsur pemaksaan, penipuan gharar, atau apa saja yang merusak akad kerja.

e. Tidak boleh diberikan pekerjaan yang terlalu berat

Apabila terpaksa melakukan pekerjaan terlalu berat mesti harus diberi bantuan oleh majikannya.

f. Buruh wajib berniat ikhlas

Dalam melaksanakan tugasnya buruh senantiasa merasa diawasi oleh Allah SWT. Sebaik-baiknya harus bekerja dengan cermat, cepat, dan hasil baik.

Prinsip utama dalam upah yaitu keadilan yang terletak pada kejelasan akad (transaksi) dan komitmen melakukannya. Akad dalam perburuhan adalah akad yang terjadi antara pekerja dengan majikannya, artinya sebelum dipekerjakan harus jelas terlebih dahulu bagaimana upah yang diterima oleh pekerja. Upah tersebut meliputi besarnya upah dan tata cara pembayaran upah, serta waktu pembayaran upah.

Berdasarkan prinsip keadilan, upah dalam masyarakat Islam akan ditetapkan melalui negosiasi antara pekerja, majikan, dan

---

<sup>64</sup> *Ibid.*, h. 315.

Negara. Dalam pengambilan keputusan tentang upah makan kepentingan pencari nafkah dan majikan akan dipertimbangkan timbangkan secara adil. Untuk itu menjadi tanggung jawab negara Islam untuk mempertimbangkan tingkat upah yang ditetapkan agar tidak terlalu rendah sehingga tidak mencukupi biaya kebutuhan pokok para pekerja juga tidak terlalu tinggi sehingga majikan kehilangan bagiannya sesungguhnya dari hasil kerja sama itu. agar dapat menetapkan terlebih dahulu tingkat upah minimumnya dengan mempertimbangkan perubahan dari pekerja golongan bawah dan dalam keadaan apapun tingkat upah ini tidak akan jatuh. Tingkat minimum ini sewaktu-waktunya harus ditinjau kembali untuk melakukan penyesuaian berdasarkan perubahan tingkat harga dan biaya hidup.<sup>65</sup>

#### a. Tingkat Upah Minimum

Pekerja hubungannya dengan majikan berada dalam posisi yang sangat lemah yang selalu kemungkinan kepentingannya tidak akan terlindungi dan terjaga dengan memberikan perhatian besar untuk melindungi hak-haknya dari pelanggaran yang dilakukan oleh majikan, sudah menjadi kewajiban para majikan untuk menentukan upah minimum yang dapat menutupi kebutuhan pokok hidup termasuk makanan, pakaian,

---

<sup>65</sup> Afzalur Rahman., *Doktrin Ekonomi Islam Jilid 2 .....*, h.365

tempat tinggal dan lainnya, sehingga pekerja akan memperoleh suatu tingkat kehidupan yang layak.

Kata “ *Tadzmau*” yang berarti dahaga, keinginan yang sangat mendesak. Kerinduan, nampaknya menunjukkan bahwa kata “*tadzmau*” tidak hanya mengandung pengertian yang sederhana yaitu dahaga terhadap air tapi dahaga (kebutuhan) terhadap pendidikan dan pengobatan. Dengan demikian sudah menjadi tanggung jawab negara Islam untuk memenuhi agar rakyat terpelihara hidupnya atau menetapkan upah minimum ada tingkat tertentu yang dapat memenuhi semua kebutuhan mereka.<sup>66</sup>

Hadis ini juga menganjurkan upah para pekerja harus cukup untuk menutupi kebutuhan-kebutuhan pokok mereka menuntut ta’aruf hidup pada saat itu dan ini sewajarnya dianggap sebagai tingkat upah minimum dalam suatu masyarakat.

b. Upah tertinggi

Islam tidak membiarkan upah di bawah tingkat minimum yang ditetapkan berdasarkan kebutuhan pokok kelompok kerja. Islam juga tidak membiarkan adanya kenaikan upah melebihi tingkat tertentu yang ditentukan berdasarkan sumbangsihnya terhadap produksi. Sebagaimana diketahui betapa pentingnya bagi mereka yang setidak-tidaknya dapat memenuhi kebutuhan

---

<sup>66</sup> *Ibid*, h.366

pokok mereka agar tercipta keadilan dan pemerataan. Oleh karena itu diharapkan bahwa tidak perlu terjadi kenaikan melampaui batas tertinggi dalam penentuan batas maksimum upah tersebut. dalam Firman Allah SWT, yang dijelaskan dalam Qs. An-Najm: 39 memberikan gambaran tentang batas upah tertinggi, yaitu:

وَأَنْ لَّيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ ٣٩

Artinya: “*dan bahwa manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahannya*”(Q.S An-Najm[53]:39)

Ayat ini menetapkan tentang apa yang dapat dituntut oleh pekerja dari para majikan mereka, upah maksimum yang mereka menuntut dari para majikan mereka, upah maksimum yang mereka menuntut dari majikan harus sesuai dengan apa yang telah mereka sumbangkan yaitu tenaga kerja mereka.

c. Tingkatan upah yang sesungguhnya

Islam telah melindungi hak-hak para majikan dan pekerja. Jatuhnya upah dibawah tingkat terendah seharusnya tidak terjadi untuk melindungi hak-hak pekerja, sebaliknya kenaikan upah yang melebihi batas tertinggi tidak seharusnya terjadi demi menyelamatkan kepentingan majikan. Upah yang sesungguhnya akan berubah dari kedua batas-batas ini dari



undang-undang persediaan dan ketenagakerjaan yang tentunya akan dipengaruhi oleh standar hidup dari kelompok kerja.<sup>67</sup>

### G. Berakhirnya Akad Ijarah

Para Ulama Fiqih menyatakan bahwa akad *al-ijarah* akan berakhir apabila :

1. Objek hilang atau musnah, seperti rumah terbakar atau baju yang dijahit hilang.
2. Tenggang waktu yang disepakati dalam akad *al-ijarah* telah berakhir. Apabila yang disewakan itu rumah, maka rumah itu dikembalikan pada pemiliknya, dan apabila yang disewakan itu adalah jasa seseorang, maka ia berhak menerima upahnya.
3. Menurut Ulama Hanafiyah, wafatnya salah seorang yang berakad, karena akad *al-ijarah*, menurut mereka, tidak boleh diwariskan. Sedangkan menurut jumhur ulama, akad *al-ijarah* tidak batal dengan wafatnya salah seorang yang berakad, karena manfaat, menurut mereka, boleh diwariskan dan *al-ijarah* sama dengan jual beli, yaitu mengikat kedua belah pihak yang berakad.
4. Menurut Ulama Hanafiyah, apabila uzur dari salah satu pihak, seperti rumah yang disewakan disita Negara karena terkait utang yang banyak, maka akad *al-ijarah* batal. Uzur-uzur yang dapat membatalkan akad *al-ijarah* itu, menurut Ulama Hanafiyah adalah salah satu pihak jatuh mufliis, dan berpindah tempatnya penyewa, misalnya, seseorang digaji

---

<sup>67</sup> Ibid ., h. 374

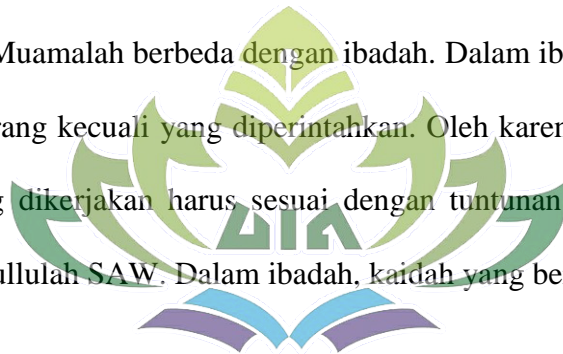
untuk menggali sumur disuatu desa, sebelum sumur itu selesai, penduduk desa itu pindah ke desa lain. Akan tetapi, menurut jumhur ulama, uzur yang boleh membatalkan akad *al-ijarah* itu hanyalah apabila obyeknya mengandung cacat atau manfaat yang dituju dalam akad itu hilang, seperti kebakaran dilanda banjir.

## H. Prinsip-Prinsip Perjanjian

Ada beberapa prinsip yang menjadi acuan dan pedoman secara umum untuk kegiatan muamalah. Prinsip-prinsip tersebut antara lain:

### 1. Muamalat Adalah Urusan Duniawi

Muamalah berbeda dengan ibadah. Dalam ibadah, semua perbuatan dilarang kecuali yang diperintahkan. Oleh karena itu semua perbuatan yang dikerjakan harus sesuai dengan tuntunan yang dikerjakan oleh Rasulullah SAW. Dalam ibadah, kaidah yang berlaku adalah



أَصْلُ فِي الْعِبَادَاتِ التَّوَقُّيفُ وَالْأَعْتِبَاعُ<sup>68</sup>

*Pada dasarnya dalam ibadah harus menunggu (perintah) dan mengikut.*

Sebaliknya dalam muamalat, semuanya boleh kecuali ada yang dilarang. Muamalat atau hubungan dan pergaulan antara sesama manusia di bidang harta benda merupakan urusan duniawi, dan pengaturannya diserahkan kepada manusia itu sendiri. Oleh karena itu, semua bentuk akad dan berbagai cara transaksi yang dibuat oleh

<sup>68</sup> Abdul Baqi, Muhammad Fuad, *Al-Lu'lu' Wal Marjan Mutiara Hadis Sahih Bukhari dan Muslim* (Jakarta: Gramedia, 2017), h. 52